

**TINJAUAN DESKRIPTIF TENTANG PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI  
TAHUN 2006**

**Dadang Ansory, Drs. Tontowi Amsia, M.Si dan Suparman Arif, S.Pd M.Pd**  
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 704 947, Faximile (0721) 704 624  
*e-mail* : dudu.ajah@yahoo.com  
Hp. 081377771161

The research problems are "What are the forms of political participation of acehnese after the MoU helsinki in election activities on the Aceh local elections 2006?". The purpose of this reseach was to determine the political participation of the Acehnese in election activities on Aceh local elections 2006. The method used in this research is qualitative descriptive methods with Historical approach, data collection technique through technical literature, documentation, analilis qualitative data techniques. Based on the research concluded on the participation of the Acehnese people in local elections which was won by Irwandi Jusup and Muhammad Nazar as governor and vice governor of Aceh.

Rumusan masalah penelitian adalah "Apa sajakah bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006 ?". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Aceh dalam kegiatan pemilihan pada Pilkada Aceh tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Historis, teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan, teknik dokumentasi, dan teknik analilis data kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan mengenai partisipasi masyarakat Aceh dalam pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh Irwandi Jusup dan Muhammad Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh.

**Kata kunci** : aceh, *mou helsinki*, pilkada

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam proses perjalanan kehidupan bernegara diarahkan pada upaya mewujudkan tujuan dari dibentuknya suatu negara. Di Indonesia sendiri apa yang menjadi tujuan dari negara ini dibentuk telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea IV. “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai kebijakan guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dasar tersebut. Pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya negara ini.

Sejarah Aceh banyak diwarnai oleh kekerasan. Sejak pemberontakan Daud Beureueh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, banyak korban baik dari GAM dan masyarakat sipil Aceh maupun Pemerintah RI yang diwakili oleh TNI. Tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu, mulai dari era Soekarno, Soeharto sampai era pasca-Soeharto. Serangkaian kebijakan desentralisasi, berupa pemberian keistimewaan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan konflik Aceh. Bahkan operasi militer pun tidak mampu meredam pemberontakan di Aceh. Sebab-sebab konflik Aceh seperti diungkapkan Neta S. Pane adalah “Jika dirunut jauh kebelakang, lahirnya pemberontakan yang berlanjut kepada gerakan separatis Aceh Merdeka, tak terlepas dari adanya pro dan kontra di kalangan tokoh-tokoh Aceh, apakah daerah itu ikut bergabung ke dalam Republik Indonesia (RI) dan mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI atau tidak. Soalnya, beberapa hari setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI, pro kontra pun muncul di Aceh (Neta S. Pane, 2001:1)”.

Pada akhirnya sebuah gerakan perlawanan yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamkan pada tanggal 24 Mei 1977 sebagai bentuk perlawanan

terhadap pusat. GAM merupakan gerakan garis keras yang menuntut kebebasan, dengan bergerilnya melakukan perlawanan membuat suasana semakin kacau sehingga hukum ada hanya dijadikan sebagai simbol. Adanya berbagai konflik tersebut mengakibatkan terbentuknya suatu kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) dengan ditandai masuknya Tentara non-organik dengan sandi “*Operasi Jaring Merah*” yang berlaku sejak tahun 1988-1998 di Aceh.

Konflik Aceh yang berlarut-larut dan memakan banyak korban jiwa akhirnya dapat diselesaikan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada tahun 2005 melalui mediasi CMI (*Conflict Management Initiative*). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan butir-butir kesepakatan yang baru disetujui inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar untuk membangun Aceh Baru yang demokratis dan berlandaskan pada *self government*. Dalam MoU Helsinki yang terdiri dari 71 butir kesepakatan, terdapat butir-butir yang mengatur tentang partisipasi politik antara yaitu butir 1.2.6 yang berbunyi: “Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia”.

Pengaturan partisipasi politik di Aceh yang diatur dalam MoU Helsinki ini merupakan ruang publik yang telah dibuka bagi keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat di Aceh termasuk mantan GAM dalam bidang politik. Pimpinan GAM sejak awal 2006 menyatakan keinginan menduduki jabatan-jabatan eksekutif dan mempersiapkan diri menghadapi pilkada langsung. Meskipun belum memiliki kendaraan politik karena belum ditetapkannya aturan mengenai dan calon independen dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tahun 2006, sebagian pimpinan GAM tidak tertarik jika ditawarkan menjadi calon dalam pilkada melalui Partai Nasional. Namun ada sebagian anggota GAM yang tidak menolak bekerjasama dengan partai nasional yang telah ada.

Dibentuknya Partai Aceh (PA) yang merupakan perubahan nama dari Partai GAM

oleh para mantan panglima dan aktifis GAM pada tahun 2007 merupakan perahu yang digunakan oleh mantan anggota GAM dalam menghadapi Pilkada, Pileg lokal dan nasional pada pemilihan umum pada tahun-tahun berikutnya. Kehadiran partai-partai lokal pasca MoU Helsinki diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh rakyat Aceh, termasuk mantan *combatan* dan aktifis GAM yang selama ini seolah terpinggirkan oleh pemerintah pusat melalui prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan berakhirnya konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia melalui MoU Helsinki bukan berarti segala tindak kekerasan telah hilang dari bumi *Serambi Mekkah*. Sebagian pihak GAM yang merasa bahwa implementasi MoU Helsinki yang diratifikasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 (UUPA) banyak yang menyimpang, terutama tentang masalah "*Self Government*". Demonstrasi dan bentuk kekerasan lain terus terjadi di Aceh yang menuntut Pemerintah Indonesia di Jakarta meratifikasi UUPA sesuai dengan hasil MoU Helsinki tahun 2006. Partisipasi politik masyarakat Aceh merupakan sarana untuk menyuarakan aspirasi demi kemajuan Aceh. Dengan adanya partisipasi politik tersebut, mereka memiliki media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006.
2. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam pembentukan partai lokal di Aceh.
3. Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam tindak kekerasan di Aceh.

Agar masalah yang diangkat dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi masalah yaitu: Partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006. Diharapkan dengan adanya pembatasan masalah tersebut, peneliti dapat

menyusun sebuah penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa sajakah bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki dalam kegiatan pemilihan pada pilkada Aceh tahun 2006 ?.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM.
- b. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat Aceh dalam kegiatan pemilihan pada Pilkada Aceh tahun 2006.
- c. Untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi politik masyarakat Aceh pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai latar belakang lahirnya otonomi khusus Aceh dalam bidang politik.
- b. Untuk memberikan gambaran tentang partisipasi politik masyarakat Aceh dalam pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2006.
- c. Sebagai sarana untuk memotivasi peranan sejarah dalam mempertahankan identitas daerah bagi masyarakat, khususnya Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berguna untuk menyelesaikan suatu penelitian dengan mengungkapkan kebenaran sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agus M. Hardjana (2003:25), bahwa metode adalah cara yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian, metode sebagai faktor penting dalam menyelesaikan suatu penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Historis. Metode deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2011: 43). Seperti juga yang diungkapkan Louis Gottschalk : “Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu”. (Louis Gottschalk, 1986: 32)

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001: 79).

Langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan metode historis adalah :

1. Heuristik, yakni kegiatan menyusun jejak-jejak masa lampau.
2. Kritik sejarah, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati, baik bentuk maupun isi.
3. Inteprestasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.
4. Historiografi, menyimpulkan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. (Nugroho Notosusanto, 1984: 84).

Menurut Sumadi Suryabrata, variabel dikatakan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata, 1991:79). Sedangkan menurut Masri Singarimbun, variabel merupakan konsep yang telah diberi lebih dari satu nilai (Singarimbun, 1981:26). Pada awal perencanaan kegiatan secara jelas

menunjukkan bahwa variabel-variabel yang ada harus dipisahkan untuk membedakan perubahan yang ada. Hal ini bertujuan sebagai strategi untuk mempermudah kita melihat perbedaan-perbedaan yang mungkin dapat kabur.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian mengenai apa sajakah bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat aceh pasca MoU Helsinki dalam pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2006. Unit analisis dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat Aceh yang telah terdaftar di dalam daftar pemilihan tetap.

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur data yang diperlukan (Muhammad Nazir, 1993:211). Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya penggunaan teknik-teknik tertentu yang sistematis dan standar akan dapat diperoleh data-data yang akan dapat menjawab dari apa yang menjadi permasalahan dari penelitian yang direncanakan.

Karena terbatasnya waktu dan biaya, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data *sekunder*. Agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik kepustakaan

“Teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo 1997:109)”, sedangkan Kontjaraningrat (1983:133) menyatakan bahwa “Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *library research* (penelitian pustaka) yaitu dengan cara:

- a. Mengumpulkan buku-buku tentang teori-teori partisipasi politik;
- b. Mengumpulkan literatur masyarakat Aceh;

- c. Mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Aceh dalam pemilihan kepala daerah.

Sumber data tersebut dapat diperoleh di perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, toko buku maupun internet.

## 2. Teknik Dokumentasi

Menurut Hadari Nawawi (2001:133), teknik dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:188), Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yaitu dengan cara :

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan masyarakat Aceh
2. Mengumpulkan data hasil pilkada Aceh 2006
3. Mengklasifikasikan data-data yang berkaitan dengan perilaku masyarakat Aceh

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran literatur atau dokumen yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki terutama pada pelaksanaan pilkada Aceh tahun 2006. Sumber data tersebut dapat diperoleh di perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, toko buku maupun internet.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang terkumpul bersifat data-data tertulis bukan berupa angka-angka, dalam hal ini juga memerlukan suatu pemikiran yang kritis dalam menganalisis data guna menyelesaikan masalah penelitian. Teknik analisis data kualitatif yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan data;
- 2) Klasifikasi data;
- 3) Pengolahan data;

- 4) Penafsiran dan penyimpulan (Muhammad Ali, 1985:151).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemilihan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Menjelang pilkada Aceh 11 Desember 2006 seluruh masyarakat Aceh terus mempersiapkan diri menghadapi pilkada langsung. Salah satu isu pertama yang menjadi perdebatan di internal masyarakat Aceh adalah soal kendaraan politik yang mereka gunakan. Hal ini terus terjadi karena belum ditetapkannya UUPA hingga bulan Agustus 2006. Oleh karena itu keinginan masyarakat Aceh yang mempunyai kedudukan atau wewenang di Aceh ingin menduduki jabatan eksekutif dengan menggunakan kendaraan politik sendiri dihadapkan pada aturan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 yang hanya memperbolehkan pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Pilkada yang semula di rencanakan dilaksanakan pada bulan April 2006 terus mundur karena belum disahkannya UUPA. Hal ini digunakan GAM untuk semakin mempersiapkan diri dengan memperbaiki gejala yang ada dalam tubuh GAM. Seperti di ungkapkan oleh IGC:

“Penundaan parlemen Indonesia dalam mengesahkan UUPA 11/2006 , di tengah perdebatan sengit terkait dengan calon independen , terus menunda kembali tanggal pemilihan . Ini mungkin membantu GAM dengan memberi lebih banyak waktu untuk mengatur strategi . UUPA akhirnya disahkan pada bulan Agustus 2006 tetapi tidak sebelum keretakan yang mendalam telah dikembangkan dalam GAM atas bagaimana untuk berpartisipasi dalam pemilu dan siapa yang harus mendukung . Akhirnya terdapat pilihan untuk aliansi dengan partai yang ada atau tetap teguh pada jalur independen” ( *Indonesia: How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007*).

Masyarakat Aceh menyikapi secara beragam kemungkinan kerja sama dengan partai nasional, terutama jika akhirnya klausul calon independen tidak diakomodir dalam UUPA. Pada awal Maret 2006 sebagian para

petinggi di Aceh menyatakan bahwa mereka tidak tertarik jika ditawarkan untuk maju sebagai calon dalam pilkada melalui partai nasional.

Jika calon independen akhirnya tidak diperbolehkan maka mereka lebih memilih untuk tidak ikut serta dalam pilkada. Namun pada akhir Maret, ada indikasi yang menunjukkan bahwa sebagian para petinggi tersebut tidak menolak bekerja sama dengan partai yang telah ada. Zakaria Saman merupakan salah seorang tokoh senior GAM yang berperan besar membentuk koalisi dengan PPP untuk memasang Hasbi Abdullah dengan Ahmad Human Hamid (Moch. Nurachim, 2007:77).

Dukungan PPP pada Hasbi Abdullah dan Ahmad Human Hamid untuk maju dalam pilkada Aceh 2006 diterima oleh sebagian masyarakat Aceh karena PPP merupakan partai yang bercorak Islam. Setelah melalui proses panjang akhirnya UUPA yang disahkan pada Agustus 2006 memperbolehkan masuknya pasangan calon dari jalur independen. Pada saat penentuan calon gubernur dan wakil gubernur perbedaan pendapat kembali muncul di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, ada dua faksi besar yang disebut terlibat persaingan yaitu pimpinan GAM senior atau kalangan tua yang

berbasis di Swedia, seperti Tkg. M. Usman Lapoh Awe, Zakaria Saman, Ilyas Abid, Muzakir Manaf, Yahya Muaz, dan Darwis Jeunib dan figur-figur yang lebih muda, yang tinggal dan berjuang di Aceh, seperti, Irwandi Yusuf, Bakhtiar Abdullah, Sofyan Dawood, Kamaruzaman, M. Nur Djuli, dan Munarwaliza. Kelompok pertama cenderung mendukung Hasbi Abdullah, sementara kelompok kedua, yang juga dikenal dekat dengan kelompok SIRA, mendukung Irwandi Yusuf untuk maju sebagai calon gubernur dari GAM (Moch. Nurachim, 2007:78).

Sejak awal Malik Mahmud sendiri dalam persoalan seleksi calon tidak menyatakan secara tegas kepada siapa ia memberikan dukungan. Saat Perdana Menteri GAM itu untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Aceh pada pertengahan April 2006, ia hanya menyebutkan bahwa ada beberapa nama yang layak dipertimbangkan antara lain Hasbi Abdullah, Teuku Kamaruzzaman, Tkg. Nashirudin bin Ahmad, Sofyan Dawood, M. Nazar, dan Irwandi Yusuf. Hingga awal Mei 2006 pencalonan gubernur masih menjadi topik yang terlalu sensitif, sehingga belum pernah dibicarakan secara terbuka dalam pertemuan resmi pimpinan GAM (Moch. Nurachim, 2007:79).

**Tabel 1. Hasil Voting Pemilihan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Internal GAM**

Voting Bakal Calon Gubernur		Voting Bakal Calon Wakil Gubernur	
Nama	Suara	Nama	Suara
Nasharuddin	39	M. Nazar	31
Hasbi Abdullah	34	Human Hamid	24
Irwandi Yusuf	9	Iqlil	12
Human Hamid	2	Nashiruddin	7
M. Nazar	2	Shadia M.	4
Iqlil	0	Irwandi Yusuf	3
Shadia M.	0	Hasbi Abdullah	3
Adnan Beuransyah	0	Adnan Beuransyah	1

Sumber : ICG, "Aceh's Lokal elections: The Role of the Free Ace Movemen", Asia Briefing, No. 57, 29 November 2006, hal.5.

Akan tetapi mekanisme penentuan bakal calon terpilih yang dikemukakan golongan tua tersebut ditolak oleh kalangan muda GAM dan mereka meminta dilakukan pemilihan ulang. Permintaan ini ditolak oleh kalangan tua. Akhirnya, sebagai kompromi

dari ketegangan antara kedua faksi ini, Malik Mahmud mengumumkan bahwa secara kelembagaan GAM tidak akan ikut bertarung dalam pilkada dan mempersilahkan anggotanya untuk maju sebagai calon independen.

Meskipun demikian, pernyataan ini tidak serta-merta mengakhiri praktik di lapangan untuk membawa struktur resmi GAM dalam persaingan memperebutkan dukungan. Dalam sebuah pertemuan para pemimpin KPA dari tingkat distrik yang diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2006, Muzakir Manaf menyatakan dukungan kepada pasangan Humam-Hasbi, sebagai calon dari GAM sejak pengunduran diri Tgk. Nashiruddin” (Moch. Nurachim, 2007:84).

Setelah UPA disahkan pada Agustus 2006 memperbolehkan calon independen, kalangan yang tidak setuju dengan pencalonan Hasbi memutuskan untuk mengajukan pasangan Irwandi Yusuf dan M. Nazar melalui jalur independen. Pasangan ini secara resmi diumumkan di kantor KPA, Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2006. Pada tanggal 6 November 2006 pasangan ini mendapat dukungan tertulis dari pimpinan KPA di seluruh Aceh. Pernyataan ini di respon Majelis Nasional dengan menyatakan bahwa dukungan terhadap pasangan Humam-Hasbi sudah final. Di tengah ketegangan yang tidak juga berakhir di antara dua generasi GAM ini, pada tanggal 27 November 2006 atau sekitar dua minggu menjelang pemungutan suara Muzakir Manaf mengeluarkan pernyataan bahwa ia menarik kembali dukungannya kepada pasangan Humam-Hasbi dan meminta pimpinan KPA pada semua level untuk bersikap netral, mewujudkan pemilihan yang bebas dan damai, serta menerima siapapun yang terpilih (ICG : *Indonesia: How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007*).

## **B. Kampanye Politik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh**

Pemilu 11 Desember pemilu adalah satu-satunya kesempatan bagi calon independen untuk berkampanye dalam pemilihan, karena pada pemilihan umum berikutnya para petinggi yang mencalonkan diri akan diminta untuk membentuk sebuah pesta dan mewakili rakyat. Akibatnya beberapa kandidat dan partai mulai kampanye mereka. PKS dan PAN masih kuat di kota, sementara PPP / Golkar yang populer di daerah pedesaan. GAM memiliki lebih

banyak dukungan dari desa-desa dari pada kota.

Masa kampanye yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD akan berlangsung selama dua pekan, terhitung 24 November- 7 Desember 2006. Deklarasi pilkada damai delapan kandidat gubernur dihalaman depan masjid kebanggaan milik masyarakat di provinsi berjudul ”Serambi Mekah” itu juga dimeriahkan atraksi pemukulan ‘rapai’ para seniman tradisional Aceh. Selain itu tidak kurang dari 300 unit becak mesin yang telah dihias mengiringi pawai bersama kandidat Gubernur/Wakil Gubernur NAD , mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol dikota Banda Aceh. Dan pilkada yang akan dilakukan 11 Desember 2006 (<http://www.antaraneews.com/print/47061/>).

### **1. Debat Kandidat Calon**

Pada hari-hari pertama dimulainya kampanye diwarnai dengan aktivitas penyampaian visi misi calon di depan anggota dewan provinsi Aceh dan debat kandidat yang diikuti calon gubernur dan wakil gubernur yang difasilitasi oleh KIP Aceh. Hari kedua kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh masih diwarnai debat kandidat. Berbeda dengan penyampaian visi dan misi di depan anggota dewan kemarin, debat kandidat yang berlangsung Sabtu (25/11) menghadirkan empat panelis dari Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry. Sayangnya, sejumlah mahasiswa, pelajar, aktivis, dan masyarakat yang menghadiri acara debat kandidat yang berlangsung di gedung AAC Dayan Dawood, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Panitia hanya menyediakan waktu kepada empat panelis mengajukan pertanyaan kepada para kandidat.

Dalam berita yang dimuat oleh <http://www.acehkita.com>, debat kandidat yang diselenggarakan JPPR, Jurdil Aceh, yang bekerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) tersebut, selain diikuti oleh tim sukses, juga diramaikan oleh para mahasiswa, aktivis LSM, pelajar, dan warga. Debat dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama yang dimulai sekitar pukul 10.00 dan berakhir menjelang shalat Dhuhur, menghadirkan empat pasang, yaitu Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria, Ahmad Humam Hamid-Hasbi

Abdullah, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, dan Azwar Abubakar-M. Nasir Djamil. Sedangkan sesi kedua yang dimulai setelah Dhuhur menampilkan pasangan Tamlicha Ali-Harmen Nuriqmar, Djali Yusuf-Syauqas Rahmatillah, Iskandar Hoesin-Saleh Manaf, dan Ghazali Abbas Adan-Shalahuddin Al Fata.

Debat kandidat pada tanggal 25 November 2006 tidak memberikan sesuatu yang baru bagi para penonton. Saat penyampaian program, hampir semua kandidat mengusung isu pendidikan gratis, kesehatan, pemberantasan korupsi, dan perbaikan pembangunan.

## 2. Strategi Kampanye Calon

Calon-calon independen yang berafiliasi dengan GAM umumnya memiliki dana yang sedikit, namun mereka mengandalkan jaringan tingkat akar-rumput yang mereka miliki, terutama di kalangan pemilih miskin dan pemilih di wilayah pedesaan, dengan pesan kampanye yang disebarakan melalui jaringan pendukung KPA yang besar. Sebaliknya, para calon dengan latar belakang teknokrat atau kontraktor, cenderung mengandalkan jaringan patronase yang lebih oportunistik (berlawanan dengan jaringan GAM yang lebih ideologis), dan kampanye media yang mencolok (dan mahal) untuk menjangkau para pemilih (S. Clark dan B. Palmer, 2008:30).

Para calon yang berafiliasi dengan GAM memanfaatkan setiap kesempatan untuk menekankan ciri ideologis (*ideological credentials*) mereka. Berpose dalam foto dengan menggunakan busana tradisional Aceh, yang kemudian muncul dalam surat suara, merupakan strategi utama dalam menggarap citra keacehan, dan membuat mereka tampak berbeda secara jelas dari calon-calon yang didukung oleh partai-partai politik nasional (Samuel Clark dan Blair Palmer, 2008:30). Hal ini menjadi daya tarik yang kuat bagi kebanyakan rakyat Aceh dan terbukti efektif menarik masa yang menginginkan sesuatu yang baru untuk Aceh.

Penetapan jadwal kampanye oleh KPI telah menetapkan pasangan Irwandi-Nazar melakukan kampanye pertamanya di Pidie pada 26 November 2006 (KPI Aceh, 2006). Pidie merupakan daerah basis utama GAM,

tetapi kebanyakan dari mereka mendukung pasangan Humam-Hasbi yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti di ungkapkan Ma'arif Syahed : "Di lapangan tersebut berkumpul kurang dari seribu orang. Pidie memang bukan basis pendukung Irwandi-Nazar. Daerah tersebut merupakan basis kuat pasangan H2O, sebutan untuk pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, yang merupakan rival utama mereka. H2O calon dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan secara resmi pernah didukung KPA. Dukungan ini diduga karena Hasbi Abdullah tak lain dari saudara kandung Zaini Abdullah, menteri luar negeri GAM di Swedia ( Ma'arif Syahed, <http://maarifsyahed.wordpress.com/2012/01/03/kemerdekaan-yang-hakiki-untuk-aceh/> ).

Kampanye Irwandi-Nazar selanjutnya diadakan pada 27 November 2006 di Lhokseumawe. Kampanye berlangsung di sebuah stadion sepak bola, namun di luar perkiraan hanya sedikit orang yang hadir di sana yaitu sekitar 1.500 orang. Ternyata banyak warga yang salah lokasi karena tempat kampanye dipindahkan dari tempat sebelumnya, lapangan Hiraq, ke stadion tersebut. "Dalam kampanye sore itu, Irwandi menyatakan bahwa KPA yang sebelumnya secara institusional mendukung pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah atau H2O telah mencabut dukungannya. Memang di markas KPA di Banda Aceh, ketua KPA Muzakir Manaf bersama dengan Bachtiar Abdullah dan Sofyan Dawood telah melakukan konferensi pers di hari yang sama untuk menyampaikan pernyataan mengenai pencabutan dukungan terhadap H2O" (Ma'arif Syahed, 2007).

GAM telah memiliki jaringan yang kuat dan dukungan tingkat desa yang luas. Para calon yang berafiliasi dengan GAM menggunakan struktur KPA untuk menyebarkan pesan kampanye, terutama secara informal, di warung-warung kopi dan pertemuan-pertemuan informal, daripada menggunakan cara berkunjung ke rumah-rumah secara terbuka dan pidato di forum publik. Para pendukung GAM terkadang hanya bertanya kepada seorang (mantan) anggota GAM calon mana yang merupakan 'uroeng tanyoe' (orang kita). Kampanye

semacam ini tidak melibatkan diskusi yang mendalam, dan banyak pendukung GAM yang hanya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit tentang para calon. Yang mereka tahu hanyalah jika mereka mendukung *uroeng tanyoe*, maka mereka harus memilih calon nomor 5 (misalnya) pada hari pemungutan suara. Para calon yang berafiliasi dengan GAM, yang berpasangan dengan calon wakil dari SIRA, juga memperoleh keuntungan dari reputasi positif SIRA yang kuat sebagai sebuah organisasi yang sangat jelas identitas keacehannya dan aktif pada masa perjuangan menentang pemerintah pusat.

### C. Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pilkada Aceh

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam 2006 (Pilkada NAD 2006) diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 serentak dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di 19 dari 21 kabupaten/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara umum, pelaksanaan Pilkada ini berjalan aman, tertib, dan terkendali. Meski demikian, sempat terjadi dua insiden peledakan dan penemuan bom rakitan di dekat sebuah TPS di kawasan pedalaman Desa Lhok Uyun, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada pukul 05.45 WIB. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak membuat suasana Pilkada NAD terganggu ([http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_Gubernur\\_Nanggroe\\_Aceh\\_Darussalam\\_2006](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Gubernur_Nanggroe_Aceh_Darussalam_2006)).

**Tabel 2. Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS Kabupaten/Kota**

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS
Banda Aceh	115.633	252
Sabang	19.303	60
Aceh Besar	194.164	660
Pidie	314.796	995
Biruen	239.241	685
Bener Meriah	74.133	260
Aceh Tengah	103.949	380
Aceh Utara	305.652	1.034
Lhok Seumawe	98.935	214
Aceh Timur	201.892	650
Langsa	88.236	210
Aceh Tamiang	145.837	431
Aceh Jaya	44.183	182
Aceh Barat	106.360	461
Nagan Raya	84.968	265
Aceh Barat Daya	74.204	198
Aceh Selatan	126.929	349
Aceh Singkil	86.658	300
Aceh Tenggara	114.880	492
Gayo Lues	46.681	197
Simeuleu	47.301	196
Total	2.632.935	8.471

Sumber : KIP Media Center

Dinamika pemilu ditingkat lokal dapat diilustrasikan dengan dua kasus. Aceh Barat, sebuah kabupaten yang oleh tsunami tahun 2004, tidak dikenal sebagai benteng GAM.

GAM baru muncul di sana pada awal 1990-an setelah Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), namun sayap militernya menjadi aktif hanya setelah tahun

1999 ketika popularitasnya tumbuh dengan perjuangan referendum untuk Aceh. Sedangkan Sabang hampir tidak ada basis GAM sama sekali, sampai-sampai ketika GAM harus menyerahkan senjata sesuai dengan perjanjian Helsinki, senjata secara diam-diam dipindahkan ke Sabang dari Aceh Timur, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa basis GAM diperluas ke utara ujung provinsi.

#### a. Aceh Barat

Di Aceh Barat pemilihan gubernur dan wakil gubernur di ikuti oleh sebagian masyarakat Aceh. Tidak semua masyarakat Aceh Barat melakukan partisipasi dalam pemilihan kali ini. Kepala KIP setempat melaporkan bahwa banyak dari daerah yang terkena dampak tsunami memiliki kesulitan mencapai tempat pemungutan suara, sehingga lebih dari 20 persen pemilih terdaftar ikut ambil bagian. Persaingan sengit antara beberapa kandidat non-GAM begitu dilaporkan bahwa telah terjadi dua insiden pemukulan bahkan sebelum kampanye dimulai.

GAM selalu akan memiliki keuntungan yang signifikan dengan suara pedesaan. Sebagai contoh, pada tanggal 7 Januari 2007, geuchiks lokal (kepala desa) mengundang para kandidat GAM untuk berkumpul dengan para korban tsunami dari Cot Buloh IDP Barracks di Kecamatan Arongan Lambalek bahkan sebelum awal resmi dari kampanye putaran kedua. Pidato yang dimulai dengan tema agama berubah politik, beberapa berfokus pada kebutuhan untuk mempertahankan proses perdamaian dan yang lain mengkritik kegagalan pemerintahan sebelumnya dan menyerukan Aceh *self-governance*. Yang menjadi salah satu pusat perhatian adalah alamat emosional di Aceh oleh penasihat agama GAM Teungku Ali, menunjukkan peran penting gerakan dalam memenangkan perdamaian dan mengamankan pendapatan lebih untuk provinsi melalui hukum pemerintah Aceh. Para kandidat GAM kepada *konstituen* mereka memiliki hanya sedikit menawarkan dan tidak banyak membuat janji-janji, kerendahan hati yang mereka miliki tampak menarik bagi para *konstituen* (ICG: Indonesia:

How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007:7).

Babak pertama berjalan lancar, polisi melaporkan hanya terjadi dua insiden kecil mungkin dikarenakan sebagian jaringan LSM lokal didirikan pada bulan Oktober 2006 seperti Aliansi Damai Aceh Pemilu Lokal (Jaringan Pilkada Aceh Damai, JPAD). Melalui *leaflet*, spanduk dan *talk show* radio lokal, ia berangkat untuk mendidik masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih kandidat. Seperti yang diungkapkan JPAD jelas bahwa akan ada pemilihan ulang di beberapa laporan muncul dari campur tangan militer.

Sebelum putaran kedua, seorang pejabat senior GAM mengklaim 1.000 Frontum dan Forkab anggota akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih, terutama di Kecamatan Johan Pahlawan yang memiliki lebih dari separuh pemilih terdaftar Aceh Barat. Para anggota Frontum yang kebanyakan dari negara tetangga kabupaten Nagan Raya telah menyusup desa pada bulan Oktober resmi diklaim. Kepala KPA lokal bahkan mengeluarkan pernyataan peringatan masyarakat untuk berhati-hati terhadap anggota GAM palsu menuntut pajak nanggroe (perpajakan) dan memeras bisnis lokal untuk merusak citra. GAM mengantisipasi komandan GAM lokal Teungku Samsul alias Abu Pahlawan menyusun rencana untuk merekrut 20.000 relawan di pusat-pusat perkotaan sebelum putaran kedua yang akan ditempatkan di Johan Pahlawan, Kaway XVI, Samatiga dan Meureubo subdistricts. Anggota KPA tambahan dari komando pusat berada di tempat untuk mencegah warga dari memicu masalah. (ICG: Indonesia: How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007:8).

#### b. Sabang

Tidak ada yang percaya bahwa GAM akan atau bisa memenangkan perlombaan bupati di Sabang, sebuah pulau dari 28.597 orang di lepas pantai utara Aceh yang dikenal untuk *duty free port*-nya, wisata dan masyarakat yang relatif sekuler. Namun, meskipun fakta bahwa GAM adalah kehadiran yang relatif baru, Munawar Liza Zainal dan pasangannya Islamuddin mendapat

35,5% suara, nyaman di depan Sabang kelahiran calon Golkar Husaini, kontraktor swasta terkenal dan kepala dari DPRD yang mendapat 29,5% (ICG: Indonesia: How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007 :9).

GAM tidak punya banyak waktu untuk memilih kandidat, Kaukus dari 25 anggota KPA setempat pada akhir September gagal untuk datang dengan nama apapun, terutama karena tidak ada dari anggotanya sendiri memiliki kualitas yang sesuai. Saat itu KPA mendekati Munawar dan Islamuddin tetapi tidak sampai pertengahan Oktober bahwa mereka resmi disahkan pencalonannya (dua minggu sebelum tanggal penutupan untuk pendaftaran). Keputusan Munawar untuk berdiri berasal dari minat dalam memperkuat struktur politik GAM menjelang Pemilu 2009 parlemen.

KPA terkonsentrasi di pinggiran perkotaan dan daerah pedesaan, sedangkan Golkar lebih terfokus pada pusat kota, memobilisasi birokrasi, pemuda nasional dan gerakan mahasiswa dan bisnis swasta untuk mendukung Husaini. Meskipun PNS diberitahu untuk tetap netral, beberapa tim sukses kunci Husaini adalah kepala departemen aktif dan yang lainnya adalah tingkat kabupaten legislator. Tidak mau bersaing langsung dengan KPA, Husaini mengatakan fokus utama tim kampanyenya adalah pemilih berpendidikan lebih tinggi di pusat.

Kewaspadaan GAM dalam menjaga daerahnya dari masuknya pengaruh calon lain mungkin telah mencegah upaya Serangan fajar (upaya menit terakhir untuk mempengaruhi pemilih melalui uang, pesan SMS atau taktik lain). Husaini mengaku ia merasa terintimidasi setiap kali ia pergi ke daerah pedesaan karena keberadaan GAM begitu kuat. Selama kampanye pemilihan kepala daerah, Anggota GAM di bawah 300 KPA bersama dengan relawan yang mereka rekrut terbukti sangat menentukan untuk kemenangan GAM. Struktur gerilya yang telah ada selama konflik adalah direvitalisasi dan anggota memobilisasi masyarakat untuk memilih (ICG: Indonesia: How GAM Won in Aceh Crisis Group Asia Briefing N°61, 22 March 2007:9).

#### **D. Hasil Pilkada Aceh 11 Desember 2006**

Pemilihan Gubernur diselenggarakan secara bersama dengan pemilihan 19 dari 21 kepala daerah di Aceh pada tanggal 11 Desember 2006. Pilkada pertama di Aceh ini berlangsung relatif aman dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang membalikan prediksi banyak pengamat, khususnya dengan apa yang diraih calon independen. Dalam pemilihan gubernur Aceh, pasangan Irwandi Jusuf dan Muhammad Nazam memperoleh 38,20 persen suara dan berhasil mengalahkan tujuh pasangan lain dengan selisih perolehan suara yang cukup jauh. Adapun tabel dibawah ini menjelaskan perolehan hasil pilkada Gubernur Aceh.

**Tabel 3. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2006**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Kandidat</b>	<b>Partai Politik/Afiliasi</b>	<b>Jumlah Suara</b>	<b>(%)</b>
1.	Iskandar Hoesin-Saleh Manaf	PBB, PDK, PP Pancasila, PNI Marhenisme, PPD, PBSO, dan PKPB	111.553	5,54
2.	Tamlicha Ali – Tgk. Herma Nuriqman	PBR, PPNU, PKB	80.327	3,99
3.	A.Malik Raden – Sayed Fuad Zakariah	Partai Golkar	281.174	1,97
4.	Ahmad Husman A – Hasbi Abdullah	PPP	334.484	16,62
5.	M. Djali Yusuf – R.A Syauqas Rahmatillah	Independen	65.543	3,26
6.	Irwandi Jusuf – Muhammad Nazam	Independen	786.745	38,20
7.	Azwar Abubakar –	PAN da PKS	213.556	10,61

	M. Nasir Jamil			
8.	Ghajali Abas Adan – Shalahudin Alfata	Independen	156. 978	7,80

Sumber : diolah dari ICG, “Indonesia: How GAM Won in Aceh” Asia Briefing, No. 61, 22 March 2007. hlm. 2-16

Dalam buku Moch. Nurhsim yang berjudul Gerakan Aceh Merdeka Ada beberapa faktor yang dianggap mendukung kemenangan Irwandi-Nazar antara lain:

Pertama, penggunaan struktur ditingkat bawah. Pasangan ini termasuk yang memiliki keuangan terbatas, sehingga dari segi artibut kampanye jauh tertinggal dari bebeapa pasangan lain. Menyadari hal ini kampanye pasangan Irwandi-Nazar dilakukan dengan mengandalkan struktur KPA ditingkat bawah, terutama yang berada dipedesaan dan SIRA, organisasi yang dipimpin oleh M. Nazar dan cukup kuat di daerah perkotaan. Anggota KPA dan SIRA melakukan pemasaran langsung pasangan Irwandi dan Nazar. Beberapa lembaga pemantau bahkan menemukan kampanye oleh pendukung Irwandi-Nazar dilakukan pada masa tenang. Secara khusus kemenangan pasangan Irwandi-Nazar atas pasangan Humam-Hamid juga menunjukkan struktur yang sebenarnya hidup diantara anggota GAM adalah KPA dan bukan Majelis Nasional. Selain itu dikalangan grassroot, secara pribadi Irwandi dan Nazar dianggap sebagai “GAM sejati” di bandingkan Humam, yang tidak ikut dalam perjuangan cecara frontal. Menurut Kautsar, faktor yang dibawah lebih memilih Irwandi-Nazar adalah faktor perjuangan, dari pada memilih Humam-Hasbi yang bukan orang Aceh, karena Hasbi tidak pernah berjuang.”

Kedua, kesan sederhana yang mengetuk keinginan atas perdamaian dan ketakutan akan kembalinya konflik. Pendukung pasangan Irwandi-Nazar mengkampanyekan bahwa perdamaian di Aceh terjadi atas perang GAM dan masa depannya akan terancam jika pasangan calon dari GAM. Mereka mengklaim sebagai pihak yang mampu memperjuangkan implementasi UUPA. Mereka juga menyampaikan pesan bahwa penderitaan rakyat Aceh tidak terlepas dari peran partai-partai yang brbasis jakarta, sehingga pilihan terbaik adalah memilih calon independen dari kalangan GAM.

Ketiga, daya tarik terhadap identitas ke-Acehan. Pakaian adat aceh yang digunakan calon dari kalangan GAM menunjukkan bahwa merakalah yang memiliki komitmen untuk menjaga hikum Islam di Aceh dan nlai-nilai tradisiaonal. Keempat, ada banyak laporan bahwa dilapangan para pendukung pasangan ini juga menyebarkan ketakutan, antara lain dengan mengirimkan layanan pesan pendek(SMS) mengenai konsekuensi jika pasangan yang mereka dukung kalah.

Kemenangan Irwandi-Nazar disebabkan karena adanya ikatan yang kuat pada kekuatan utama GAM di lapangan. Selain itu anggapan bahwa pasangan ini dapat membawa Aceh menuju perdamaian dan memperjuangkan hukum islam berdiri dibumi serambi Mekkah menjdi alasan yang kuat untuk memilih Irwandi-Nazar untuk memimpin rakyat Aceh. Intimidasi dari kalangan GAM berupa ancaman jika calon yang mereka usung tidak menang dalam pilkada menjadikan rakyat Aceh khawatir peperagan akan terus terjadi.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan mengenai partisipasi politik masyarakat Aceh dalam pemilihan kepala daerah di Aceh yang di menangkan oleh pasangan independen yakni Irwandi Jusup dan Muhammad Nazar sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Partisipasi politik masyarakat Aceh merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan jalan politik. Dalam partisipasi politiknya pada pilkada Aceh tahun 2006, masyarakat Aceh cukup aktif dalam berbagai kegiatan pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan mencari dukungan atau komunikasi massa, membentuk tim sukses yang solid, kampanye politik yang sederhana naum memiliki kekuatan emosional ke-Acehan, dan sampai ketitik akhir yaitu hasil pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar, Ahmad, Sayed Mudhahar dan Dinamika Yarmen. 1999. *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Islam Utama.
- Djumala, Darmansjah. 2013. *Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjana, Agus M. 2003. *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Kanisius..
- Kontjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Nazir, Muhammad. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurhasim, Moch. 2008. *Konflik Aceh: Analisis Atas sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaiannya*. Jakarta: LIPI.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Bookstore.
- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah dan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: solusi, harapan, dan impian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Singarimbun, Irawati (Ed. Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi). 1981. *Teknik Wawancara, Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Lp3es.
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.